

**EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI DESA
SIJENGGUNG KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Meiga Puspita Anggraini, Dr. Supratiwi, S.Sos., M.Si

Email: meigapuspita14@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407
Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program kolaboratif antara TNI dengan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan di desa-desa tertinggal sekaligus sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara TNI dan rakyat dalam ketahanan nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui perencanaan yang melibatkan aspirasi masyarakat di daerah yang menjadi sasaran dengan menggunakan sistem perencanaan *bottom up planning* yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu. Program ini hadir sebagai salah satu solusi terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan menysasar program fisik dan non fisik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi terhadap program untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan teori evaluasi program model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Stufflebeam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi program TMMD di Desa Sijenggung menunjukkan bahwa pelaksanaan program TMMD telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni dari pembangunan fisik dan non fisik, meskipun terdapat faktor hambatan cuaca dan kondisi geografis namun dapat teratasi dengan baik. Walaupun secara keseluruhan sudah berhasil masih perlu adanya keberlanjutan dari program agar program yang sudah berhasil dapat memberikan manfaat secara optimal dan berjangka panjang. Keberhasilan program didasari karena adanya sinergi yang baik antara TNI, pemerintah dan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu kolaborasi multi sektor antara pemerintah daerah, TNI dan pemerintah desa dengan menjalin kemitraan dengan swasta untuk memperluas target pembangunan, pemerintah daerah dan TNI menekankan penyuluhan terkait pemeliharaan program kepada masyarakat sasaran program, meningkatkan kegiatan non fisik secara berjangka dengan menggandeng instansi terkait melakukan evaluasi pasca program secara komprehensif untuk memastikan manfaat jangka panjang.

Kata Kunci : TMMD, Evaluasi Program, Pembangunan Desa, Sinergi

ABSTRACT

The TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Program is a collaborative program between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and local governments, aimed at accelerating and equalizing development in underdeveloped villages. It also serves as an effort to strengthen the relationship between the TNI and the people in national resilience. This is realized through planning that involves the aspirations of communities in the targeted areas, using a bottom-up planning system that is implemented comprehensively and integratedly. This program is present as one solution to the difficulties faced by the community by targeting physical and non-physical programs. The purpose of this study is to evaluate the program to ensure its relevance and effectiveness in achieving the expected goals, using Stufflebeam's CIPP (Context, Input, Process, Product) model of program evaluation theory. The method used in this research is descriptive qualitative, with purposive sampling as the informant selection technique. The research results show that the evaluation of the TMMD program in Sijenggung Village indicates that the implementation of the TMMD program has achieved the set targets, namely from physical and non-physical development, although there were obstacles such as weather and geographical conditions, these could be overcome well. Although overall it has been successful, there is still a need for continuity of the program so that the programs that have been successful can provide optimal and long-term benefits. The success of the program is based on good synergy between the TNI, the government, and the community. The recommendations resulting from this research are multi-sector collaboration between local governments, the TNI, and village governments by establishing partnerships with the private sector to expand development targets, local governments and the TNI emphasizing counseling related to program maintenance to target communities, increasing non-physical activities on a regular basis by involving relevant agencies to conduct comprehensive post-program evaluations to ensure long-term benefits.

Keywords: *TMMD, Program Evaluation, Village Development, Synergy.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang terencana dan mencakup semua aspek kehidupan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata di suatu negara. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan adalah ketimpangan antar wilayah, terutama antara desa dan kota. Ketimpangan ini tercermin dalam masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana. Meskipun desa merupakan unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran strategis sebagai basis dan penyedia kebutuhan bagi daerah pusat, seperti bahan baku pangan dan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembangunan desa yang efektif sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan (Febriyani, 2014:442).

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah program pembangunan terpadu antara TNI dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Program ini fokus pada peningkatan kesejahteraan, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, serta pembinaan keamanan

wilayah. TMMD berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur tugas pokok TNI, termasuk membantu tugas pemerintah daerah melalui operasi militer selain perang. Program ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya koordinasi teknis pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara garis besar TMMD merupakan bentuk operasi Bhakti TNI, yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI dan pemerintah daerah, serta komponen masyarakat lainnya, dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan. Setelah pemisahan Polri dari ABRI, program ABRI Masuk Desa (AMD) berganti nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD adalah wujud operasi TNI Bhakti yang menggabungkan program daerah dengan program lintas sektoral dari pusat dan daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Setiowati, 2015:102).

TMMD fokus pada penanggulangan kemiskinan, terutama di desa-desa tertinggal, serta memperkuat kerjasama antara TNI, pemerintah, dan masyarakat.

Program ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap tahun, melibatkan berbagai pihak, dan menggunakan pendekatan *bottom-up planning system* (Madva, 2018:6). Di tengah permasalahan kemiskinan, ketertinggalan, kesenjangan wilayah, dan dampak bencana alam, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) hadir untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non-fisik. Pelaksanaan TMMD berlangsung selama 30 hari, mencakup pembangunan fisik (infrastruktur) dan non-fisik (penyuluhan, edukasi). Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan TNI dengan rakyat dan mencapai stabilitas nasional.

Kabupaten Banjarnegara, sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Tengah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, menjadi fokus pelaksanaan TMMD. Program ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di desa-desa tertinggal dan terisolir. Sengkuyung III (Desa Wanayasa): Pembangunan jalan penghubung antar desa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Desa Sijenggung, terletak di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, berada di puncak gunung dan berbatasan

dengan kecamatan lain. Desa ini berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota Banjarnegara dan menghadapi masalah infrastruktur transportasi yang terbatas. Akses yang sulit, terutama menuju Kecamatan Punggelan yang memakan waktu 1,5 jam, menghambat distribusi barang, mengingat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Pembangunan akses yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan sekitarnya, serta mempermudah mobilitas masyarakat.

Desa Sijenggung dipilih sebagai lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2024 karena urgensi masalahnya, serta kesiapan dan kondusivitas masyarakat dan lembaga desa dalam mendukung program tersebut, termasuk swadaya material dan tenaga kerja, serta lokasi yang aman dari sengketa. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan program ini diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur dan peraturan bupati. TMMD telah berlangsung sejak tahun 1980 dan dilaksanakan selama 30 hari di setiap desa. Durasi singkat ini menimbulkan pertanyaan mengenai

efektivitas program dalam menghasilkan dampak nyata, mengingat program pembangunan pada umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama.

Meskipun desa memiliki dana desa dan program pembangunan lainnya, TMMD tetap eksis karena esensinya adalah mempercepat pembangunan daerah, terutama di desa-desa. Dengan demikian perlu adanya evaluasi efektivitas TMMD dalam akselerasi pembangunan desa, dengan fokus pada Desa Sijunggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 dengan tujuan menganalisis keberhasilan program TMMD di Kabupaten Banjarnegara.

B. KAJIAN TEORI

Teori Model Evaluasi Program CIPP

Evaluasi program CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Evaluasi program menurut (Stufflebeam, 1973 dalam (Arifin, 2019:124)) adalah “suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.” Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process and Product*) yang diperkenalkan oleh Stufflebeam merupakan rangkaian evaluasi program yang komprehensif karena model evaluasi ini menganalisa mulai dari konteks, input, proses dan produk agar

dapat menilai dan mengembangkan manfaat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan bijak dari perolehan informasi evaluasi, serta menyempurnakan kebijakan program. Tahapan-tahapan evaluasi model CIPP ini memiliki sejumlah aspek yang terdiri dari utilitas, kelayakan dan akurasi sehingga lebih terencana, sistematis dan hasil dapat terukur dengan jelas (Divayana, 2018). Model Evaluasi CIPP terdiri dari empat aspek:

a) Context Evaluation

Evaluasi terhadap konteks menurut Arikunto (dalam Divayana, 2018) merupakan cara dalam mendeskripsikan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Tujuan penting dari evaluasi konteks adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi organisasi secara menyeluruh. Komponen dalam evaluasi ini terdiri dari kebutuhan program, sasaran program dan tujuan program.

b) Input Evaluation

Evaluasi terhadap *input* menurut Mutrofin (dalam Setiyaningrum, 2016:27)) memberikan panduan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan program.

Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan tim pelaksana, analisis strategi yang akan diterapkan dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah didesain untuk mencapai setiap strategi. Oleh karena itu evaluasi berdasarkan *input* ditujukan untuk menilai dan menggambarkan strategi dan rancangan kerja yang diperlukan dalam suatu program agar dapat dijalankan dan diputuskan sehingga dapat terhindar dari kemungkinan kegagalan program. Komponen dalam evaluasi ini terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan prosedur yang digunakan.

c) *Process Evaluation*

Evaluasi terhadap proses ini memiliki tujuan dalam mengidentifikasi rangkaian prosedur atau implementasi yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan sekaligus menghasilkan data informasi yang dapat disusun dalam pengambilan keputusan mengenai program serta sebagai dokumen mengenai prosedur yang telah dilakukan. Evaluasi pada proses sebagai upaya untuk memonitoring, mendokumentasikan dan menilai kegiatan program di lapangan. Pada hal ini evaluasi mengukur seberapa jauh pelaksanaan

program apakah dapat berjalan sesuai rencana. Apabila disimpulkan evaluasi terhadap proses adalah upaya untuk memberikan nilai dan menggambarkan rangkaian kegiatan program yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen dalam evaluasi ini terdiri dari pelaksanaan program, monitoring program dan hambatan pada program.

d) *Product Evaluation*

Evaluasi terhadap hasil adalah evaluasi yang ditujukan untuk menuntun pada pengambilan keputusan melalui fokus pada hasil yang didapatkan, seberapa jauh kebutuhan dapat tereduksi dan langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam memahami tingkat keberhasilan pada capaian program. Evaluasi produk sebagai wujud proses pengumpulan dan analisa data untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu produk dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengintegrasian sejumlah informasi dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja produk, sehingga melalui informasi yang telah diperoleh sebagai penentu keberhasilan produk dan pengambilan keputusan yang tepat terkait pengembangan produk di masa

yang akan datang apakah perlu dihentikan, dimodifikasi atau diteruskan dengan strategi yang sama. Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan program serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Komponen dalam evaluasi ini terdiri dari hasil program, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (Nasution, 2023:34) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menemukan dan mendeskripsikan fenomena yang tidak dapat diukur melalui kuantitatif dengan berdasarkan data yang didasari oleh teori sebagai penjas. Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifat masalahnya berupa penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai suatu fenomena dengan menggambarkan suatu mekanisme proses. Sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Context Evaluation

a) Kebutuhan Program

Kebutuhan fisik yang terdiri dari personil, sarpras, masyarakat dan swadaya dari pemerintah desa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program sudah terakomodir sebelum kegiatan TMMD dimulai. Untuk pemenuhan kebutuhan sasaran non fisik didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan fenomena yang ada di Desa Sijenggung. Secara garis besar pemetaan kebutuhan dilihat dari beberapa hal yakni melalui identifikasi masalah infrastruktur yang menghambat aktivitas masyarakat, penilaian akses masyarakat terhadap layanan fasilitas dasar, potensi ekonomi wilayah dan kebutuhan dalam hal ini melihat dari segi ekonomi wilayah serta potensi pengembangan wilayah. Untuk pemenuhan kebutuhan program, tim fasilitasi yakni Dispermades PPKB menggandeng dinas maupun OPD terkait yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sijenggung. Pelaksanaan non fisik tentunya dengan memperhatikan APBD berdasarkan kebutuhan kemudian dituangkan melalui SK. Upaya pemenuhan kebutuhan program

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sijenggung dengan mengumpulkan masyarakat, dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena program TMMD adalah program bersama dan manfaatnya pun akan dirasakan bersama.

b) Sasaran dan Tujuan Program

Sasaran pokok untuk meningkatkan masyarakat daerah yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan salah satunya melalui pembangunan fisik yaitu sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan mobilisasi. Dalam hal ini berupa upaya meningkatkan sarana transportasi seperti jalan penghubung antara wilayah. Bahwasanya Desa Sijenggung merupakan desa yang memiliki keterbatasan akses mobilisasi yang mana masyarakatnya harus memutar wilayah lain yaitu memutar Kecamatan Banjarmangu yang mana harus melewati sejumlah dusun dan desa dengan jarak tempuh lama untuk menuju layanan dasar selain itu juga membutuhkan jalur untuk mempercepat mobilisasi dan transportasi angkutan khususnya hasil

perkebunan masyarakat guna meningkatkan perekonomian.

Melalui adanya program TMMD terbagi menjadi dua sasaran yaitu sasaran fisik non fisik. Sasaran fisik berupa sejumlah pembangunan diantaranya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 806 meter yang menghubungkan dua wilayah yaitu Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu dan Telaga Mlaya Kecamatan Punggelan yang mana dalam hal ini masyarakat Desa Sijenggung tidak perlu memutar jalan yang lebih jauh, pembangunan jembatan sepanjang tiga meter, dua RTLH dan pos kamling. Kemudian sasaran non fisik berupa sosialisasi dan penyuluhan oleh sejumlah dinas maupun instansi yang mana penentuan sejumlah kegiatan non fisik didasari dengan kebutuhan masyarakat Desa Sijenggung antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dispermades Kabupaten Banjarnegara mengenai penyuluhan dan pelayanan KB serta penurunan risiko kematian ibu dan bayi, BPBD Kabupaten Banjarnegara sosialisasi terkait mitigasi bencana, Pengadilan Negeri Banjarnegara melakukan sosialisasi mengenai E-Berpadu dan E-Court, Kejaksaan Negeri

Banjarnegara melaksanakan penyuluhan mengenai penegakan Perda sedangkan Kodim 0704/Banjarnegara melaksanakan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Bahwasannya penentuan kriteria sasaran program TMMD melihat aspek kebermanfaatan yang mana memudahkan akses dasar dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

Apabila ditinjau untuk pembangunan fisik seperti jalan dipertimbangkan dengan menganalisis seberapa besar kebermanfaatan itu dirasakan sehingga mempertimbangkan kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keterlibatan masyarakat bersama dengan TNI yang diwujudkan dalam interaksi pembangunan fisik maupun non fisik tidak terlepas dari tujuan pokok utama untuk meningkatkan kemandirian TNI yang bermuara pada pertahanan negara. Sehingga secara tidak langsung dengan membangun hubungan emosional melalui kegiatan TMMD antara TNI dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan TMMD juga ditentukan dengan pertimbangan dari sisi strategis pertahanan militer yaitu penguatan garis belakang. Penguatan

garis belakang dalam konteks ini untuk memperkuat dukungan dan sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu dari segi pertahanan sebagai upaya meningkatkan keamanan wilayah melalui kehadiran TNI diharapkan ketahanan sosial masyarakat meningkat sekaligus meminimalisir ancaman dari luar.

Input Evaluation

a) Prosedur Program

Pelaksanaan program TMMD Reguler Ke-120 Desa Sijenggung berdasarkan perintah yang tertuang pada Surat Perintah Sprin/241/V/2024. Perintah tersebut tertuang Surat Telegram Danrem 071/Wk Nomor : ST/199/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang perintah melaksanakan operasi kegiatan TMMD ke-120 dan Sengkuyung Tahap II TA 2024 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Mei s.d 6 Juni 2024. Perintah pelaksanaan TMMD ini dilakukan dengan cara komando berdasarkan perintah tingkat tertinggi ke Kodam, Kodam kepada Korem dan Korem kepada Kodim. Berdasarkan prosedurnya, Program TMMD dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan:

- Melibatkan rapat koordinasi (rakornis) antara dinas dan instansi terkait.
 - Kegiatan pra-TMMD mencakup penyusunan organisasi Satgas TMMD, penentuan sasaran dengan sistem *bottom-up planning* melalui musyawarah masyarakat desa, dan peninjauan sasaran TMMD berdasarkan verifikasi SIPD.
2. Tahap Persiapan:
- Sosialisasi rencana pelaksanaan TMMD kepada masyarakat desa.
 - Persiapan sarana, prasarana, dan material pembangunan fisik.
 - Konfirmasi personel TNI dan tenaga swadaya masyarakat.
 - Tahap ini adalah tahap sebelum pelaksanaan dimulai, yang dilaksanakan dengan kerja sama antara Kodim, pemerintah daerah, instansi terkait dan komponen masyarakat.
3. Tahap Pelaksanaan:
- Dimulai dengan upacara pembukaan dan diakhiri dengan upacara penutupan.
 - Pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik sesuai target waktu 30 hari.
- Kunjungan Tim Wasev TMMD dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan desa.
4. Tahap Pengakhiran:
- Dilaksanakan bersamaan dengan upacara penutupan.
 - Pelaporan hasil pelaksanaan TMMD kepada Pejabat Koordinasi Operasi (PKO).
 - Rapat evaluasi di tingkat Penanggung Jawab Keberhasilan Pelaksana (PKP).
- Sedangkan prosedur penetapan lokasi dan pelaksanaan perencanaan program disiapkan satu tahun sebelum program tersebut dilaksanakan. Prosedur penetapan berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah desa ke SIPD Baperlitbang melakukan *screening* terhadap proposalproposol SIPD kemudian dikategorikan yang layak untuk disurvei kemudian disesuaikan kembali antara proposal yang diajukan dengan kondisi lapangan. Kemudian setelah ditetapkan desa yang sesuai secara administratif dilimpahkan ke Dispermades untuk diusulkan melalui SK dan ditentukan desa mana saja yang akan menjadi Sengkuyung I, II dan III bersama dengan Kodim. Untuk penetapan Reguler melihat kondisi sasaran apabila sasaran perlu membutuhkan personil dan anggaran yang lebih besar

maka akan digolongkan menjadi TMMD Reguler.

b) Sumber Daya Manusia

Keterlibatan sumber daya manusia pada kegiatan TMMD melibatkan tenaga yang sesuai dengan bidangnya yakni personil dari Satuan Zeni Tempur yang memiliki pengetahuan dibidang konstruksi dan pembangunan. Adapun personil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banjarnegara yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan program. Dari sisi pemerintah desa sendiri mengupayakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam bekerja sama menjalankan program TMMD.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa yakni dengan mengadakan musyawarah desa untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan tahapan program TMMD kepada masyarakat. Komunikasi langsung ini membangun kedekatan dan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW dan tokoh agama untuk memobilisasi dan menggerakkan masyarakat.. Karena umumnya masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh serta secara bersamaan pelaksanaan TMMD bersamaan dengan waktu bekerja masyarakat maka partisipasi tenaga dari masyarakat mengacu pada pembagian

jadwal secara bergantian dengan mengerahkan 120-150 masyarakat Desa Sijenggung. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi esensi kegotong-royongan pada program TMMD. Dengan melibatkan sumber daya yang terampil menciptakan efektifitas dan efisiensi program selain itu pelaksanaan program melibatkan pengawasan dari dinas terkait yang berfokus pada pembangunan.

c) Anggaran dan Sarana Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana alat oleh para pelaksana program dengan saling berkoordinasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan pada program. Pada persiapan sarana dan prasarana sekaligus material dilaksanakan secara bersamaan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai yaitu ketika pada tahap Pra TMMD. Kesiapan sarana dan prasarana sudah diperhitungkan dengan matang oleh tim pelaksana dan pemerintah desa sebagai penerima program dimana keseluruhan peralatan telah disiapkan dan berjalan dengan baik.

Adapun dukungan dari masyarakat untuk membawa peralatan masing-masing dalam mendukung pengerjaan. Kemudian dukungan dari warga yang menghibahkan lahan miliknya untuk dijadikan bagian prasarana pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan

aksesibilitas warga sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan adanya respon dan kontribusi positif masyarakat terhadap pembangunan desa melalui program TMMD. Besaran anggaran dalam program bergantung pada jenis proyek yang dibangun dan kondisi lingkungan yang diprioritaskan. Alokasi dana menjadi hal yang krusial untuk berjalannya program. Anggaran dalam pelaksanaan program TMMD Reguler Ke-120 Desa Sijunggung berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan swadaya masyarakat.

Dukungan anggaran dalam kegiatan TMMD sepenuhnya berasal dari Pemerintah Daerah serta swadaya dari masyarakat setempat baik untuk kegiatan anggaran fisik maupun non fisik. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerjasama antara TNI dan Pemerintah Daerah guna percepatan pembangunan di wilayah yang sulit terjangkau maka provinsi menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Skala Besar; kabupaten/kota menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan program

TMMD pada SKPD berkenaan; dalam hal belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD; melaksanakan kegiatan dimaksud dengan memprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya.

Process Evaluation

a) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program TMMD Desa Sijunggung sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang terdiri dari kegiatan fisik yang berupa pembangunan jembatan, jalan rabat beton, pos kamling dan RTLH. Untuk kegiatan non fisik sendiri terbagi menjadi tiga satgas yaitu:

- Satgas I meliputi Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
- Satgas II meliputi Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Kodim 0704/Banjarnegara
- Satgas III meliputi Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Banjarnegara dan
BPBD Kabupaten Banjarnegara

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan program pun sudah sesuai dengan yang direncanakan yakni selama 30 hari yang dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan 6 Juni 2024. Lamanya waktu pengerjaan yang singkat tidak mengubah esensi dari tujuan program TMMD untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa setempat. Sedangkan untuk hasil evaluasi pada pelaksanaan kesesuaian perencanaan dengan implementasi.

Keberhasilan suatu program juga tidak luput dari adanya koordinasi antar pihak begitu juga dengan program TMMD yang melibatkan sejumlah unsur dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program untuk masing-masing pihak sudah memahami perannya masing-masing sehingga ketika amanat untuk melaksanakan program TMMD turun maka setiap pihak sudah memahami tupoksi yang akan dilakukan baik

b) Monitoring Program

Monitoring program TMMD dilakukan oleh seluruh pejabat Angkatan Darat yaitu Staf Teritorial Angkatan Darat (Sterad) untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi (wasev) secara berjenjang mulai dari Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Dalam hal ini TNI menurunkan tim peninjauan pada minggu pertama, kedua dan ketiga. Sebelum tim dari Mabes TNI meninjau, tim dari Kodam, Korem dan Sterad sudah melaksanakan peninjauan terlebih dahulu sehingga dalam hal ini Kodim tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa pengawasan. Tidak hanya dari unsur TNI saja namun juga bekerja sama dengan Dinas Pekerja Umum dari provinsi. Monitoring yang dilakukan oleh jajaran TNI sangat detail dan teliti seperti pemeriksaan bahan campuran material dilihat dan dibongkar untuk memeriksa pondasi batu apa saja yang dipakai untuk memastikan bahan material yang digunakan sesuai standar.

Monitoring yang berjenjang dan bertahap menunjukkan komitmen untuk memastikan program dapat dijalankan secara optimal untuk masyarakat. Selain monitoring yang dilaksanakan secara terjadwal dan berkala, Pemerintah Desa Sijenggung

dengan para Babinsa melaksanakan monitoring internal. Pada mekanisme monitoring dilakukan inspeksi secara langsung dari Tim Wasev Kodam dan Korem. Satgas TMMD, Tim Fasilitasi dan pemerintah desa dalam monitoring melakukan pelaporan secara berkala. Untuk keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi sebagai bentuk untuk mendapatkan masukan dan umpan balik. Untuk hasil monitoring berupa identifikasi perubahan, masalah dan solusi yang berupa tindak lanjut pada temuan di lapangan, penilaian terhadap kepatuhan prosedur.

c) Hambatan Pada Program

Pada pelaksanaan program TMMD di Desa Sijenggung masih ditemukan hambatan dalam prosesnya sehingga perlu adanya kerja sama dari masing-masing peran secara responsif terhadap situasi di lapangan. Kendala utama adalah pada faktor cuaca apabila terjadi hujan maka pengerjaan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan sehingga memerlukan waktu yang lebih. Sulitnya cuaca yang diprediksi maka strategi yang digunakan TNI dan masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan yakni dengan lembur

dan tentunya dari pihak TNI meminta pengertian kepada masyarakat karena semua dampak dari program ini juga untuk masyarakat. Kemudian kendala pada akses material yang masuk ke lokasi program yang mana harus dilakukan secara manual karena kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk kendaraan besar untuk pengangkutan material sehingga perlu waktu dan tenaga ekstra. Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para pelaksana kegiatan melalui upaya kerja sama yang baik oleh semua pihak.

Product Evaluation

a) Hasil Program

Hasil program seperti infrastruktur telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dan mengenai penyelesaian fisik sudah sesuai rencana. Selain keberhasilan dalam kuantitas, aspek kualitas dari hasil program perlu diperhatikan. Dalam hal ini tim fasilitasi memastikan hasil program pasca satu bulan upacara penutupan dan serah terima hasil program untuk melihat apakah hasil program masih baik atau tidak. Setelah monitoring pasca pelaksanaan program

ditunjukkan bahwa hasil program masih baik.

Pembangunan jalan rabat beton pada program TMMD ditujukan untuk mempermudah mobilisasi masyarakat khususnya dalam mengakses layanan dasar sekaligus sebagai pendukung dalam upaya peningkatan ekonomi mengingat mayoritas penduduk Desa Sijenggung adalah petani salak dan kayu yang memerlukan akses alternatif dalam pendistribusian barang melalui jalan rabat beton. Jalan rabat beton dan jembatan di Desa Sijenggung sudah terlaksana secara maksimal sesuai dengan target yakni sepanjang 806 meter dan berukuran 3 meter \times 3 meter secara tepat waktu.

Pembangunan pos kamling ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sebagai upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa melalui penguatan hubungan komunikasi antar warga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Pembangunan pos kamling dapat diselesaikan dengan baik dan terdapat temuan jika pembangunan pos kamling yang agak sedikit berbeda yang semula direncanakan seluas 2 \times 3 meter

terbangun menjadi 7 \times 7 meter diselesaikan secara tepat waktu.

Pada program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas umum masyarakat saja melainkan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga melalui perbaikan infrastruktur dasar dengan membangun kembali hunian yang tidak layak huni. Pembangunan RTLH mampu mencapai target yang telah ditentukan yang berjumlah tiga unit rumah secara tepat waktu. Melalui pembangunan RTLH yang menyasar pada tiga rumah pada program TMMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga melalui perbaikan infrastruktur dasar yang nyaman dan aman.

Pembangunan non-fisik dalam TMMD di Desa Sijenggung melibatkan berbagai dinas dan OPD yang terbagi menjadi tiga satgas, dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum, kesehatan, wawasan kebangsaan, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana.

1. Satgas I:

- Penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan kesehatan (posyandu, posbindu) oleh Dinas Kesehatan Banjarnegara untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
2. Satgas II:
- Sosialisasi E-Court dan E-Berpadu oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memperkenalkan sistem peradilan elektronik.
 - Sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Kodim 0704/Banjarnegara untuk memupuk semangat nasionalisme.
3. Satgas III:
- Penyuluhan swasembada pangan dan teknik perawatan tanaman oleh Dinas Pertanian Perikanan Ketahanan Pangan Banjarnegara untuk meningkatkan kapasitas petani dan ketahanan pangan desa.
 - Sosialisasi potensi bencana dan upaya mitigasi bencana oleh BPBD Banjarnegara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Sijunggung melalui

edukasi dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang.

b) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Program

Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program merupakan hal yang krusial untuk memahami seberapa efektif hasil dari program. Pada pemanfaatan hasil program harus mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai faktor keberhasilan. Dalam hal ini masyarakat Desa Sijunggung mampu memanfaatkan fasilitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjangkau akses dasar secara efektif dan efisien. Adapun pemanfaatan hasil program dalam bentuk non fisik seperti sosialisasi dapat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi hanya beberapa materi saja yang dapat dirasakan secara langsung seperti pelayanan KB dan posyandu anak. Sedangkan untuk sosialisasi lain yang berhubungan dengan sektor pertanian, wawasan kebangsaan, hukum dan pengoperasian aplikasi perlu adanya evaluasi kembali mengingat sosialisasi yang dilaksanakan hanya sekali belum dapat disimpulkan bahwa berhasil sepenuhnya sehingga perlu adanya jangka waktu untuk memastikan hingga masyarakat paham dan dapat

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atas materi yang disampaikan.

Sedangkan pemeliharaan hasil program merupakan kunci dari keberlanjutan program secara jangka panjang. Suatu program dapat dikatakan sukses harus memiliki sistem atau prosedur pemeliharaan yang jelas. Pada program TMMD di Desa Sijenggung, pemerintah desa berkomitmen dan merumuskan rencana pemeliharaan rutin dengan melibatkan masyarakat melalui upaya kerja bakti untuk merawat hasil program. Adapun rencana yang dilakukan pemerintah desa untuk melakukan pengaspalan jalan dan jembatan agar hasil cor lebih tahan lama mengingat jembatan dan jalan menjadi fasilitas yang sering digunakan dalam sehari-hari. Oleh karena itu pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program untuk keberhasilan jangka panjang tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik yang tercapai, tetapi juga pada kapasitas masyarakat dan sistem yang dibangun untuk menjaga dan memanfaatkan hasil tersebut. Pemeliharaan yang efektif harus melibatkan keterlibatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan dukungan yang berkelanjutan dari

pemerintah guna memastikan bahwa manfaat dari program dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di desa Sijenggung secara umum sudah berhasil dan memenuhi berdasarkan indikator-indikator evaluasi yang dilakukan yang meliputi *context*, *input*, *process* dan *product*. Keberhasilan program ini ditunjukkan melalui tercapainya pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik. Keberhasilan program TMMD di Desa Sijenggung didukung oleh dua faktor yaitu sinergitas antar aktor yang dibuktikan melalui pola komunikasi dan kerja sama antar aktor yang sudah memahami perannya masing-masing dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga pasca program selesai. Hasil pembangunan fisik memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kegiatan non fisik yang dilaksanakan hanya sekali menjadi catatan dan tantangan bahwa perlu adanya keberlanjutan sehingga program tidak hanya menekankan pada program fisiknya saja.

b) Saran

1. Pemerintah desa dengan menggandeng instansi terkait maupun tim fasilitasi hendaknya melaksanakan evaluasi pasca program untuk menilai dampak dari kegiatan non fisik dengan melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku sebagai indikator mengingat kegiatan non fisik hanya dilakukan sekali saja sehingga tidak terkesan sebagai formalitas dan simbolis saja.
2. Mengikutsertakan TNI khususnya melalui Babinsa yang berperan sebagai pembina potensi wilayah untuk mengelola keberlanjutan dan pendampingan kepada masyarakat untuk turut serta dan aktif dalam mendukung keberlanjutan program sekaligus sebagai perpanjangan tangan antara masyarakat dengan dinas, OPD serta pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah menekankan pelaksanaan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan infrastruktur agar

masyarakat memahami tanggung jawab mereka sebagai penerima program terhadap hasil program yang telah dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Arifin, H. Z. (2019). Evaluasi Program: Teori dan Praktek Dalam Konteks Pendidikan dan NonPendidikan.
- Divayana, D.G.H. (2018). Evaluasi Program Konsep Dasar dan Pengimplementasiannya. Depok: Rajawali Pers.
- Nasution, A.F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Harva Kreatif.
- Panorama, M., & Muhajirin (2017). Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Idea Press
- Pemerintah Desa Sijenggung. (2024). *Analisis Penduduk Lulusan Sekolah Desa Sijenggung Tahun 2024*. Banjarnegara: Pemerintah Desa Sijenggung.

Pemerintah Desa Sijenggung. (2024). *Desa Sijenggung Dalam Infografis 2024*. Banjarnegara: Pemerintah Desa Sijenggung.

Suryadin, A., Sari, W. P., & Nurfitriani, M. P. (2022). *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya*. Samudra Biru.

Jurnal

Febriyani, R. (2014). Pengembangan Wilayah Hinterland Di Kecamatan Kedungkandang Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Wilayah Buring-Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Madva, L. (2018). Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).

Marunduh, P. N., Mantiri, M., & Kimbal, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Ke-99 Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Nabilah, A. F., & Rahaju, T. (2022). Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. *Publika*, 1347-1360.

Setiowati, I. N. (2015). Perkembangan ABRI Masuk Desa (AMD) tahun 1980- 1998. *Avatara: E-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 101-114.

Syamsir, S., Frinaldi, A., Sinaga, A., & Ananda, B. R. (2023). Kebijakan Kegiatan TMMD (Keterpaduan Antara TNI dan Pemda Dalam Rangka Sishankamrata Untuk Kesejahteraan Rakyat) Di Kota Padang. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 110-114.

Toruan, T. S. L. (2017). Evaluasi Program Tni Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Wilayah Dki Jakarta Dan Sekitarnya. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(2), 205-216.

Skripsi

Setiyana, R. A. (2023). Skripsi Implementasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Badakarya Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

Setiyaningrum, A. (2016). Implementasi Model Evaluasi CIPP pada Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen

Laporan Program TMMD Reguler Ke-120 TA 2024 Kodim 0704/Banjarnegara

Pedoman Optimalisasi Kegiatan TMMD Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah

Rencana Pelaksanaan Program TMMD Reguler Ke-120 TA 2024 Kodim 0704/Banjarnegara

Rencana Umum Program TNI Manunggal Membangun Desa Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara

Rencana Kerja Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (TMMD) APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024